

# Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

<sup>1</sup>Kartika Ratri Kusumasari\*, <sup>2</sup>Indri Kartika

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[kartikaratri20@gmail.com](mailto:kartikaratri20@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, belanja modal, intergovernmental revenue, temuan audit dan opini audit keuangan BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan menggunakan teknik purposive sampling, seluruh anggota populasi memenuhi syarat menjadi sample. Data sekunder diperoleh dari website Kementerian Dalam negeri, Kementerian Keuangan, dan Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa, ukuran pemerintah daerah dan tingkat kemakmuran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal dan intergovernmental revenue berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara opini dan temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.*

**Kata Kunci:** Karakteristik Pemerintah Daerah; Kinerja Keuangan; Faktor Audit

## ASBTRAC

*The purpose of this study was to determine the effect of local government size, wealth, capital expenditure, intergovernmental revenue, opinion, and BPK audit findings on the financial performance of regency/city in Central Java. Population of this research is all of regency/city in Central Java, data analysis technique used in this study is purposive sampling, all the population was qualified to be samples. The data collection is done by observation on secondary data which is collected from official website Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia, and Audit Board of the Republic of Indonesia using the method of documentation. The result of the analysis showed that local government size and wealth have negative effect is insignificant on the financial performance, capital expenditure and intergovernmental revenue have positive significant effect on the financial performance. On the other hand, the variables opinion, and BPK audit findings positif effect is insignificant on the financial performance of the regencies/cities in Central Java.*

**Keywords:** characteristic of local government, financial performance, factor audit

---

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut asas desentralisasi dengan adanya otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam “(Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan sebuah kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam kabupaten maupun kota, untuk mengurus daerahnya sendiri dengan baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Konsekuensi adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.” Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah harusnya bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dana tersebut dan juga untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana public yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi yang tertulis pada perumusan skema strategis suatu organisasi sector swasta maupun public yang dilakukan dalam periode tertentu. Menurut (Sularso & Restianto, 2011) Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator tertentu. Penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah beda dengan kinerja keuangan perusahaan. Selain karena berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan laba.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya suatu daerah (Kusumawardani et al., 2012). Ukuran pemerintah yang besar pada pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik harus didukung dengan asset yang baik. Oleh sebab itu, makin besar ukuran suatu daerah yang ditandai dengan jumlah besar asset yang dihatapkan bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Selain ukuran pemerintah daerah, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah kemakmuran. Kemakmuran merupakan kemampuan suatu daerah dalam mencukupi suatu kebutuhan (Masdiantini & Erawati, 2016) Kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. PAD yang tinggi menunjukkan daerah mampu memanfaatkan potensi daerah yang ada dan bisa menandakan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah..

Intergovernmental revenue dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dan juga untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah (Minarsih, 2015). Makin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka akan makin ketat juga pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan pengawasan yang ketat dapat mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana yang diterima dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

---

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah (Antari & Sedana, 2018). Salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah adalah pembangunan infrastruktur umum. Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pemerintah.

Opini audit adalah sebuah pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Undang-Undang No.15 Tahun 2004) Opini audit digunakan untuk pertimbangan baik dan buruknya kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu makin baik opini audit yang diberikan maka bias menunjukkan jika kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga baik.

Temuan audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang dapat menjadi tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Parwanto & Harto, 2017). Temuan audit bisa berupa kelemahan pengendalian intenal, penyimpangan, kecurangan dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Semakin banyaknya temuan pelanggaran yang ditemukan dapat menggambarkan buruknya kinerja suatu daerah tersebut.

Beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya, namun masih diperoleh hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan (Marfiana & Kurniasih, 2013) bahwa opini audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Masdiantini & Erawati, 2016), (Parwanto & Harto, 2017) menunjukkan jika opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Masdiantini & Erawati, 2016), (Parwanto & Harto, 2017) yang menunjukkan jika temuan audit memiliki pengaruh negative tidak signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian (Ade Noviyanti et al., 2016) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, hal tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, belanja modal, opini audit, temuan audit yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Masdiantini & Erawati, 2016). Perbedaan penelitian terletak pada: (1) Penambahan variabel belanja modal yang mengacu pada penelitian (Ni Made & Eka, 2016). Belanja modal biasanya terkait dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (2) Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015-2017. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Masdiantini & Erawati, 2016) menggunakan sampel pemerintah daerah Bali pada tahun 2008-2013.

---

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja Keuangan

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018) kinerja keuangan digunakan untuk memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas), untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), memenuhi semua kewajibannya (solvabilitas) dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah termasuk dalam penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan system keuangan yang sudah ditetapkan lewat kebijakan dan ketentuan perundang-undangan dalam satu periode(Sari et al., 2016).

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut (Ni Made & Eka, 2016) kinerja keuangan pemerintah daerah bisa diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah ini ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik daerah berupa ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernment revenue, dan belanja modal, serta beberapa faktor audit berupa opini audit dan temuan audit.

### Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut “(Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online) ukuran adalah hasil ukur yang menunjukkan besaran ukuran suatu benda yaitu panjang, besar, luas, atau besaran tertentu.” Menurut (Kusumawardani et al., 2012) ukuran merupakan satu nominal yang bisa menjelaskan sesuatu. Ukuran pemerintah menunjukkan besar dan kecilnya pemerintahan tersebut.

Menurut (Masdiantini & Erawati, 2016) size yang besar pada pemerintah daerah bisa memberikan kemudahan pada pelaksanaan kegiatan maupun program pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. (Masdiantini & Erawati, 2016) menyatakan bisa diukur dengan cara melihat jumlah karyawan, total asset, tingkat produksi dan total pendapatan. Menurut (Sari et al., 2016) ukuran pemerintah daerah diukur melalui total aset. Total aset dipilih karena nilainya lebih stabil daripada jumlah pendapatan dan jumlah pegawai.

### Kemakmuran (Wealth)

“Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online), kemakmuran adalah semua harta milik dan kekayaan yang dimiliki Negara untuk keperluan seluruh rakyat.” Menurut (Masdiantini & Erawati, 2016) kemakmuran adalah suatu kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Jadi definisi kemakmuran daerah secara umum bisa diartikan kemampuan masing-masing daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya dengan memanfaatkan pendapatan yang didapatkan oleh daerah.

Besarnya PAD dapat menunjukkan jika daerah mampu mendayagunakan sumber daya alam dan potensi yang ada. Menurut (Masdiantini & Erawati, 2016) pertumbuhan PAD yang tinggi bisa mengindikasikan jika pemerintah daerah telah melakukan usaha yang maksimal dengan menggali sumber PAD yang ada di daerahnya. Tingkat kemakmuran pasti berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public yang ada sebagai bukti peningkatan kinerja pemerintah. (Maiyora et al., 2015)kemakmuran pemerintah dapat diukur dengan menggunakan jumlah PAD. Semakin tinggi PAD artinya makin bagus pula kinerja pemerintah daerah. Menurut (Sudarsana & Rahardjo, 2013) kemakmuran pemerintah daerah juga dapat diukur dengan cara membandingkan PAD dengan total pendapatan.

### **Intergovernmental Revenue**

Berdasarkan “(Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.” Menurut (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011) intergovernmental revenue juga bisa dikenal dengan dan perimbangan. Dana perimbangan adalah hasil dari kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Bagi Hasil pajak dan Sumber daya alam), Dana Bagi Hasil(Pajak dan Sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut (Minarsih, 2015) dana perimbangan juga dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ketimpangan dan juga untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan daerah. Jadi dapat disimpulkan intergovernmental revenue adalah suatu pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

Menurut (Asmaul, 2016) intergovernmental revenue dapat diukur dengan perbandingan anantara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Pengukuran ini dipilih karena intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dengan transfer pemerintah pusat.

### **Belanja Modal**

Menurut “(Peraturan Daerah Pemerintah Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017, 2017), penganggaran belanja modal dapat digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset.” Menurut (Ni Made & Eka, 2016) belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan dalam lebih dari satu tahun anggaran dan bisa menambah kekayaan asset daerah.

Kegiatan belanja modal bisa dikatakan sebagai kegiatan investasi pemerintah daerah, namun dalam hal ini belanja modal pada pemerintah daerah tidak mencari provit (Antari & Sedana, 2018) Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dapat bersumber dari pendapatan dan pembiayaan. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya. Belanja modal dapat digunakan dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, seperti

pembangunan infrastruktur, pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan dan asset tetap lainnya. Pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu kegiatan pengeluaran modal yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Menurut (Ni Made & Eka, 2016) belanja modal dapat diukur dengan membandingkan belanja modal dengan total belanja daerah.

### **Temuan Audit**

Menurut Pedoman Penyusunan Kertas Data Audit, setiap temuan hendaknya memuat tanggapan dari audit, sehingga terjadi kesamaan informasi (balancing information) terhadap informasi temuan yang disajikan oleh auditor. Tanggapan yang diuraikan dalam temuan audit adalah berupa tanggapan yang diberikan secara tertulis bersama antara tim audit dan auditi dalam pembicaraan temuan. Berdasarkan “(Undang-Undang No.15 Tahun 2004), dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas temuan audit dibagi menjadi dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan atas SPI terbagi menjadi tiga kelompok temuan, yaitu kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian umum.”

Menurut “(Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017) tentang standar pemeriksaan keuangan Negara menyatakan bahwa temuan pemeriksaan dapat berupa kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan Negara. Dengan demikian, temuan pemeriksaan BPK dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.” Menurut (Parwanto & Harto, 2017) temuan pemeriksaan bisa diukur dengan menggunakan nilai temuan yang ada pada laporan hasil pemeriksaan BPK

### **Opini Audit**

Menurut “(Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017) opini audit adalah pemeriksaan dengan memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan, khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini.” Menurut (Masdiantini & Erawati, 2016) opini audit adalah pernyataan dari professional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai dengan “(Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017) pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan tujuan memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan Negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Oleh karena itu hasil pemeriksaan BPK berupa opini audit merupakan hal yang sangat penting sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan.” Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

### **Hipotesis**

Dalam penelitian ini dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

- H2: Kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H3 : Intergovernmental revenue berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H4 : Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H5 : Temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
- H6 : opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan prosedur statistic (Indriantoro & Supomo, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan dan pemeriksaan pada tahun 2015-2017. Terdiri dari 35 kabupaten/Kota dengan jumlah sampel dalam 3 tahun penelitian 2015-2017 adalah sebanyak 105.

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variable dependen atau variable terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang bisa menjadi akibat, karena adanya variable bebas (PD Sugiyono, 2017) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut (Sari et al., 2016) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkatan pencapaian suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang didalamnya termasuk penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan system keuangan yang sudah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Kinerja Keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio efisiensi (Sari et al., 2016). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Asmaul, 2016). Rasio efisiensi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisaisi Penerimaan}}$$

(Asmaul, 2016)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi bab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (PD Sugiyono, 2017) variabel. Dalam penelitian ini variabel dependen terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, opini audit dan temuan audit.

Ukuran pemerintah daerah menurut (Kusumawardani et al., 2012) adalah ukuran nominal yang bisa menjelaskan sesuatu, ukuran pemerintah menunjukkan besar atau kecilnya pemerintah tersebut.. Dalam penelitian ini variabel ukuran pemerintah daerah diukur

dengan menggunakan Ln (Total Aset). Total asset dapat diperoleh didalam laporan Neraca daerah (Sari et al., 2016) Ukuran pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln (Total Aset)}$$

(Sari et al., 2016)

### **Kemakmuran**

Kemakmuran dalam penelitian ini diproyeksikan dengan pendapatan Asli Daerah sebab semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut “(Undang-Undang No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam penelitian ini kemakmuran diukur dengan menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan (Sudarsana & Rahardjo, 2013) Kemakmuran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemakmuran} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Sudarsana & Rahardjo, 2013)

### **Intergovernmental Revenue**

Menurut (Minarsih, 2015) dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini variabel *intergovernmental revenue* diukur dengan cara membandingkan total dana perimbangan dengan total pendapatan (Asmaul, 2016). *Intergovernmental revenue* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IR = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Asmaul, 2016)

### **Belanja Modal**

Menurut (Ni Made & Eka, 2016) belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan atau asset daerah. Dalam penelitian ini belanja modal dapat diukur dengan cara membandingkan belanja modal dengan total belanja (Ni Made & Eka, 2016), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Ni Made & Eka, 2016)



---

## Temuan Audit

Temuan audit menurut (Sudarsana & Rahardjo, 2013) adalah kasus yang telah ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang telah dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku. Rentang jumlah temuan kasus untuk menentukan klasifikasi sedikit atau banyak temuan audit dalam penelitian adalah dengan menggunakan nilai rata-rata temuan kasus kelemahan SPI di seluruh pemerintah daerah sampel. Dalam penelitian ini temuan audit diukur dengan menggunakan skala 3 poin yaitu dengan melihat jika rentang temuan lebih dari nilai rata-rata temuan maka memiliki klasifikasi temuan banyak maka nilai 1, jika rentang jumlah temuan sama dengan nilai rata-rata maka klasifikasi temuan sedang maka nilai 2 dan jika rentang jumlah temuan lebih kecil dari nilai rata-rata maka nilai klasifikasi sedikit maka diberi nilai 3 (Masdiantini & Erawati, 2016).

## Opini Audit

Menurut Peraturan “BPK No. 1 Tahun 2017 opini audit adalah pemeriksaan dengan memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan, khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini.” Dalam penelitian ini opini audit diukur dengan menggunakan skala 4 poin yaitu Wajar Tanpa Pengecualian=4, Wajar Dengan Pengecualian=3, Tidak Wajar=2, Tidak Memberikan Pendapat=1 (Parwanto & Harto, 2017).

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu dimana objek penelitian adalah seluruh populasi yaitu seluruh pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan kriteria objek penelitian yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015-2017.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi data tentang laporan keuangan pemda dan laporan keuangan yang sudah diaudit BPK sumber data berasal dari *website* Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan keuangan tahun 2015-2017, yang dapat diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan yaitu [www.dpk.depkeu.go.id](http://www.dpk.depkeu.go.id), dan Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Variable dependen atau variable terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah sedang variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, temuan audit dan opini audit.

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis ini menggunakan pengujian analisis regresi linear berganda, yang dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, temuan audit dan opini audit. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 WEALTH + \beta_3 IR + \beta_4 BM + \beta_5 TEMUAN + \beta_6 OPINI + \varepsilon$$

Y : Kinerja keuangan

$\alpha$  : Konstan

$\beta$  : Koefisien regresi variabel independent

SIZE : Ukuran Pemerintah Daerah

WEALTH : Kemakmuran (wealth)

IR : *Intergovernmental Revenue*

BM : Belanja Modal

OPINI : Opini Audit

Temuan : Temuan audit

$\varepsilon$  : Koefisien error

## Hasil Penelitian

### Deskripsi Sampel

**Tabel 4.1**  
**Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah	35
Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Data Lengkap	0
Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Laporan Pemeriksaan BPK	0
Jumlah Sampel yang Memenuhi Kriteria	35

Sumber: Data Sekunder diolah 2020

Kriteria pengambilan sampel adalah pemerintah daerah kabupaten dan Kota se-JawaTengah sebanyak 35. Pemerintah daerah yang tidak memiliki data lengkap sebanyak 0 dan pemerintah daerah yang tidak memiliki laporan hasil pemeriksaan BPK adalah 0. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Maka total sampel yang dalam 3 tahun pengamatan 2015-2017 adalah sebanyak 105.

### Analisis Deskriptif

**Tabel 4.2**  
**Statistics Deskriptive**

	SIZE	KM	BM	IR	TMN	OPN	KINERJA
N Valid	105	105	105	105	105	105	105
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	28.76677	.15364	.18471	.61312	2.07	3.78	.99960
Median	28.67100	.14000	.17800	.61400	2.00	4.00	.99600
Mode	28.409 <sup>a</sup>	.142	.154	.584 <sup>a</sup>	3	4	.956 <sup>a</sup>
Std. Deviation	.568957	.056942	.048827	.063949	.880	.416	.052554
Minimum	25.878	.079	.043	.360	0	3	.860
Maximum	31.034	.382	.316	.722	3	4	1.145

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan table 4.2 di atas diketahui bahwa variabel ukuran pemerintah dengan nilai tertinggi sebesar 31,034 dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang, sedangkan nilai terendah sebesar 25,878 dimiliki oleh Kabupaten Purworejo dengan rata-rata sebesar 28,76677 dengan standar deviasi sebesar 0,568957. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antar nilai maksimum dan minimum. Variabilitas data yang rendah bisa dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel ukuran pemerintah memiliki tingkat akurasi yang baik sebab nilai rata-rata sebesar 28,766 lebih besar dari nilai tengahnya sebesar 28,671.

Variabel kemakmuran dengan nilai tertinggi sebesar 0,382 dimiliki oleh Kota Semarang, sedangkan Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai terendah sebesar 0,079, dengan rata-rata 0,15364 dengan standar deviasi sebesar 0,056942. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antar nilai minimum dan maksimum. Variabilitas data yang rendah bisa dikatakan jika penyebaran data normal. Selain itu, variabel kemakmuran memiliki tingkat akurasi yang baik sebab nilai rata-rata 0,1536 lebih tinggi dibandingkan nilai median sebesar 0,1400.

Variabel *Intergovernmental Revenue* tertinggi dimiliki oleh kabupaten Wonogiri sebesar 0,722, sedangkan *Intergovernmental revenue* terendah dimiliki oleh Kota Semarang sebesar 0,360. Memiliki rata-rata sebesar 0,6131 dengan standar deviasi sebesar 0,063949. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel *intergovernmental revenue* memiliki tingkat akurasi yang baik sebab nilai rata-rata 0,6131 lebih tinggi dibandingkan nilai median sebesar 0,1640.

Variabel belanja modal tertinggi sebesar 0,316 dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah dengan belanja modal terendah dimiliki oleh Kabupaten Rembang sebesar 0,043. Memiliki rata-rata sebesar 0,18471 dengan standar deviasi 0,048827. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai maksimum dan nilai minimum. Variabilitas data yang rendah bisa dikatakan jika penyebaran data normal. Selain itu, variabel belanja modal memiliki tingkat akurasi yang baik sebab nilai rata-rata 0,1847 lebih besar disbanding nilai tengahnya sebesar 0,1780.

Variabel temuan audit terbesar berjumlah 3 temuan dan jumlah terendah dengan tidak ada temuan terdapat di kabupaten banyumas kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kebumen. Dengan nilai modus sebesar 3 hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antar nilai maksimum dan minimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel temuan audit memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 2,07 lebih besar dari nilai tengah sebesar 2,00.

Variabel opini audit BPK dengan nilai tertinggi yaitu 4 dan nilai terendah 3, dan memiliki nilai modus sebesar 4, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antar nilai maksimum dan minimum. Variabilitas yang rendah bisa dikatakan penyebaran data terjadi normal. Selain itu variabel opini audit memiliki tingkat akurasi yang baik sebab nilai rata-rata 3,78 lebih besar dan nilai tengah sebesar 4,00.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai maksimum sebesar 1,145 dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Brebes dan nilai minimal sebesar 0,860 dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Memiliki rata-rata sebesar 0,99960, dengan standar deviasi sebesar 0,52554. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antar nilai maksimum dan minimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variable ukuran pemerintahan memiliki tingkat akurasi yang baik sebab nilai rata-rata 0,99960 lebih besar dari nilai tengahnya sebesar 0,99600.

**Uji Asumsi Klasik**

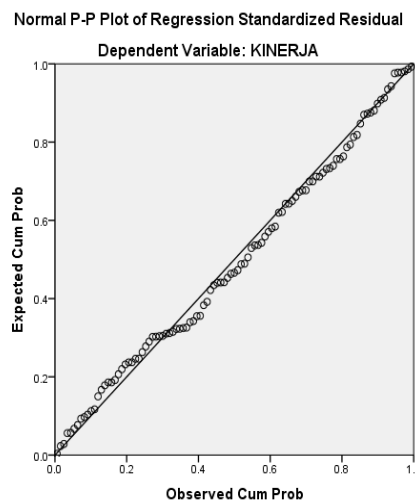
**Uji Normalitas**

**Tabel 4.3**  
**Uji normalitas**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04236253
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.038
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, dapat dilihat jika nilai signifikansi 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.



**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**

Hasil pengujian ini menunjukkan *residual* (kesalahan pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP plot menunjukkan nilai residual yang dekat dengan garis diagonal.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
SIZE	.689	1.452	Non multikolinieritas
KM	.583	1.715	Non multikolinieritas
IR	.638	1.567	Non multikolinieritas
BM	.804	1.243	Non multikolinieritas
TMN	.945	1.058	Non multikolinieritas
OPN	.858	1.165	Non multikolinieritas

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Hasil perhitungan variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai *tolerance* 0,689 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,452 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel kemakmuran menunjukkan nilai *tolerance* 0,583 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,715 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan jika tidak ada gejala multikolinieritas antar variable independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan nilai *tolerance* 0,638 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,567 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variable independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel belanja modal menunjukkan nilai *tolerance* 0,804 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,243 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan jika tidak ada gejala multikolinieritas antar variable independen dengan model regresi..

Hasil perhitungan variabel temuan audit menunjukkan nilai *tolerance* 0,945 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,058 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variable independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel opini audit menunjukkan nilai *tolerance* 0,858 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,165 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan jika tidak ada gejala multikolinieritas antar variable independen dengan model regresi.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi *Durbin Watson***

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 <sup>a</sup>	.350	.310	.043640	1.864

Sumber: Data Sekunder diolah 2020

Tabel 4.5 menunjukkan nilai uji *Durbin Watson* pada model persamaan regresi berada oada daerah  $du < d < 4-du$  ( $1,804 < 1,864 < 2,196$ ). Dengan demikian tidak terdapat autokorelasi.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *glejser*.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.114	.158		.718	.475
SIZE	-.002	.005	-.036	-.298	.766
KM	-.031	.059	-.069	-.530	.597
IR	-.034	.050	-.083	-.670	.505
BM	.081	.058	.153	1.385	.169
TMN	.002	.003	.074	.724	.471
OPN	-.007	.007	-.118	-1.106	.271

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Hasil uji heterokedastisitas pada table menunjukkan jika data variable yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada table jika probabilitas (sig) dalam tiap model regresi  $> 0,05$ .

**Pengujian model regresi**

**Tabel 4.7**  
**Hasil analisis regresi linier berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	.993	.265		.000
SIZE	-.008	.009	-.086	.385
KM	-.063	.098	-.068	.523
IR	.163	.084	.199	.054
BM	.588	.098	.546	.000
TMN	.003	.005	.053	.530
OPN	.008	.011	.060	.494

Sumber: data diolah, 2020

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi bentuk standard adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,993 - 0,008(\text{size}) - 0,063(\text{KM}) + 0,163(\text{IR}) + 0,558(\text{BM}) + 0,003(\text{TMN}) + 0,008(\text{OPN}) + \varepsilon$$

**Uji Hipotesis**

**Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.101	6	.017	8.804	.000 <sup>b</sup>
Residual	.187	98	.002		
Total	.287	104			

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan dari table uji F bisa dilihat jika nilai F hitung sebesar 8,804 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut <0,05 yang artinya hasil pengujian bisa mengindikasikan jika model regresi layak untuk digunakan. Variable independen yaitu ukuran pemerintah, kemakmuran, belanja modal, *intergovernmental revenue*, temuan audit, dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.9**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 <sup>a</sup>	.350	.310	.043640

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Hasil hitung regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diperleh sebesar 0,310. Hal ini berarti 31,0% Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh ukuran pemerintahan, kemakmuran, belanja modal, *intergovernmental revenue*, opini audit dan temuan audit dan sedangkan sisanya 69% kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel lain.

## Uji Signifikansi t (uji Parsial)

Tabel 4.10  
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Kesimpulan
Konstanta	0,993	3,750	0,000	
Size	-0,008	-,873	0,385	Negatif tidak signifikan. Hipotesis ditolak
KM	-0,063	-,641	0,523	Negatif tidak signifikan. Hipotesis diterima
IR	0,163	1,949	0,054	Positif tidak signifikan. Hipotesis ditolak
BM	0,588	6,013	0,000	Positif signifikan. Hipotesis diterima
TMN	0,003	,630	0,530	Positif tidak signifikan. Hipotesis diterima
OPN	0,008	,684	0,496	Positif tidak signifikan. Hipotesis ditolak

Sumber: Data sekunder diolah 2020

Variabel ukuran pemerintah daerah memberikan nilai koefisien -0,873 dengan nilai signifikansi 0,385, sehingga dapat dikatakan variabel ukuran pemerintah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemakmuran menunjukkan hasil koefisien -0,641 dengan nilai signifikansi sebesar 0,523 artinya variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

Variabel *intergovernmental revenue* nilai koefisien 0,163 dan nilai signifikansi 0,054, artinya variabel *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh terhadap variable kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal menunjukkan nilai regresi 6,013 dan nilai signifikansi 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ), maka artinya variabel belanja modal berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

Temuan audit menunjukkan nilai koefisien 0,630 dengan nilai signifikansi 0,530, artinya variabel temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap variable kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit menunjukkan nilai koefisien 0,684 dan nilai signifikansi 0,496, maka variabel opini audit berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis atas hasil regresi adalah sebagai berikut:

## a. Hipotesis Pertama

Uji hipotesis pertama dilakukan untuk memperoleh bukti tentang adanya pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menghasilkan nilai t hitung  $(-0,873) < t \text{ tabel } (1,98397)$  dengan nilai koefisien regresi -0,008 dengan nilai signifikansi 0,385 ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel kinerja keuangan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t maka variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi hasil tersebut tidak didukung secara empiris, sebab nilai signifikansinya berada jauh di atas 5%. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

## b. Hipotesis Kedua

Uji hipotesis kedua dilakukan untuk mendapatkan bukti mengenai adanya hubungan antara tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai t hitung  $(-0,641) < t \text{ tabel } (1,98397)$  dengan nilai koefisien regresi -



0,063 dengan nilai signifikansi 0,523 ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t bisa dijelaskan jika variabel kemakmuran memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi hasil yang ada tidak didukung secara empiris, sebab nilai signifikansinya berada jauh di atas 5%. Maka dari itu hipotesis kedua ditolak.

#### c. Hipotesis Ketiga

Uji hipotesis ketiga dilakukan untuk mendapatkan bukti mengenai adanya hubungan antara *intergovernmental revenue* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai t hitung (1,949) > t tabel (1,983) dengan nilai koefisien regresi 0,163 dan nilai signifikansi 0,054 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Berdasarkan hasil dari persamaan regresi bisa dijelaskan jika  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil uji t maka *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung secara empiris, sebab nilai signifikansinya berada di atas 5%. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

#### d. Hipotesis Keempat

Uji hipotesis keempat dilakukan untuk melihat bukti empiris mengenai adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai t hitung (6,013) > t tabel (1,983) dengan nilai koefisien regresi 0,588 dan nilai signifikansi 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil uji t dapat dijelaskan jika variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung secara empiris, sebab nilai signifikansinya berada di bawah 5%. Maka dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

#### e. Hipotesis Kelima

Uji hipotesis kelima dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai adanya hubungan antara temuan audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menghasilkan nilai t hitung (0,630) < t tabel (1,983) dengan koefisien regresi sebesar 0,003 dan nilai signifikansi 0,530 ( $\text{sig} > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t bisa dijelaskan jika variabel temuan audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil ini tidak didukung secara empiris, sebab hasil signifikansinya jauh berada di atas 5%. Dengan demikian maka hipotesis kelima ditolak.

#### f. Hipotesis Keenam

Uji hipotesis keenam dilakukan untuk mendapatkan bukti mengenai hubungan antar opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menghasilkan nilai t hitung (0,684) < t tabel (1,983) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,008 dan nilai signifikansi 0,496 ( $\text{sig} > 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterimayang berarti variabel opini audit memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji t bisa dijelaskan jika variabel opini audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil yang didapatkan tidak didukung secara empiris, sebab nilai signifikan berada diatas 5%. Dengan demikian hipotesis kelima ditolak.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan jika ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rata-rata ukuran pemerintah daerah tingkat II di Jawa Tengah adalah sebesar 28.76677, nilai minimal ukuran pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah sebesar 25.878 dan nilai maksimal ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 31.034. Sebab semakin besar aset maka efisiensinya semakin kecil. Besar jumlah aset daerah dapat membuat pemerintah sulit untuk mengawasi semua aset yang dimiliki oleh daerahnya secara langsung. Dalam hal ini dapat memungkinkan untuk terjadi tindak penyalahgunaan pada aset yang bisa saja mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian milik (Marfiana & Kurniasih, 2013) dan (Ade Noviyanti et al., 2016) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun temuan ini tidak sejalan dengan (Masdiantini & Erawati, 2016), (Sari et al., 2016), (Asmaul, 2016) dan (Maiyora et al., 2015) yang membuktikan jika ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **2. Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan jika tingkat kemakmuran suatu daerah memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata PAD pemerintah daerah dibagi total pendapatan selama tahun penelitian pemerintah daerah tingkat II sebesar 0,15, sedangkan mediannya adalah sebesar 0,14, nilai rata-rata mendekati nilai median dapat dikatakan tingkat kemakmuran di Jawa Tengah adalah sedang. Tingkat efisiensi pemerintah daerah adalah sebesar 0,99 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi juga belum maksimal. Hasil ini menunjukkan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Temuan ini sama dengan penelitian (Marfiana & Kurniasih, 2013) yang mengatakan jika kemakmuran memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh (Wahyudin & Dhini Suryandari, 2013) yang mengatakan bahwa kemakmuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan penelitian (Masdiantini & Erawati, 2016), (Ni Made & Eka, 2016), dan (Maiyora et al., 2015) yang mengatakan jika kemakmuran memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki presentase yang masih tinggi. Rata-rata *intergovernmental revenue* adalah sebesar 0,613, sedangkan mediannya adalah 0,614 nilai rata-rata temuan audit mendekati nilai median dapat dikatakan jika temuan audit di Jawa Tengah adalah sedang. Dari hasil statistic deskriptif dapat dilihat nilai rata-rata hampir memiliki hasil yang sama pada tiap kategorinya. Hasil ini seharusnya bisa dijadikan satu tekanan untuk pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah yang selalu diawasi oleh pemerintah pusat sehingga bisa memberikan kinerja yang terbaik.

Temuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan (Masdiantini & Erawati, 2016) dan (Ni Made & Eka, 2016) yang mengatakan jika *intergovernmental revenue* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Maiyora et al., 2015), (Asmaul, 2016), (Sari et al., 2016), (Marfiana & Kurniasih, 2013), dan (Ade Noviyanti et al., 2016) mengatakan jika tingkat ketergantungan pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian kali ini menunjukkan jika belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata belanja modal selama tahun penelitian pemerintah daerah tingkat II sebesar 0,184, sedangkan mediannya adalah sebesar 0,178, nilai rata-rata mendekati nilai median dapat dikatakan tingkat belanja modal di Jawa Tengah adalah sedang. Belanja modal dapat memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah yang berkaitan juga dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang baik bisa meningkatkan pembangunan fasilitas umum yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Hal ini bisa mengindikasikan kalau anggaran belanja pemerintah daerah telah dilakukan dengan baik, yang dapat mengakibatkan belanja daerah memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Asmaul, 2016)(Andirfa et al., 2016) (Marfiana & Kurniasih, 2013), dan (Ade Noviyanti et al., 2016) yang mengatakan jika belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi temuan ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan (Ni Made & Eka, 2016) yang mengatakan jika belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan (Antari & Sedana, 2018a) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **5. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika temuan audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata temuan audit selama tahun penelitian adalah sebesar 2,07, sedangkan mediannya adalah 2, nilai rata-

rata temuan audit mendekati nilai median dapat dikatakan jika temuan audit di Jawa Tengah adalah sedang. Tingkat efisiensi pemerintah daerah tingkat II di Jawa Tengah adalah sebesar 0,99 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi juga belum maksimal. Hal ini menjelaskan mengapa temuan audit belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit memerlukan revisi namun pelaksanaan revisi hanya sebagai pemenuhan kewajiban namun tidak disertai dengan tindakan lanjut dari pemerintah untuk melakukan kinerja dengan lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan temuan (Ade Noviyanti et al., 2016) yang mengatakan jika temuan audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini tidak sama dengan temuan (Masdiantini & Erawati, 2016), (Parwanto & Harto, 2017), (Marfiana & Kurniasih, 2013) yang mengatakan jika temuan audit memiliki pengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **6. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian kali ini menunjukkan jika opini audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata opini audit selama tahun penelitian adalah sebesar 3,78. Sedangkan mediannya adalah 4, nilai rata-rata mendekati nilai median dapat dikatakan jika opini audit di Jawa Tengah wajar tanpa pengecualian. Efisiensi pemerintah daerah tingkat II di Jawa Tengah adalah sebesar 0,99 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi juga belum maksimal. Hal ini menjelaskan mengapa opini audit belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit belum dapat menjelaskan kes/terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena opini audit BPK merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang lebih menekankan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan tidak berfokus pada kinerja keuangan.

Temuan ini sejalan dengan (Masdiantini & Erawati, 2016) yang menyatakan jika opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun temuan ini tidak sama dengan temuan (Masdiantini & Erawati, 2016), (Ni Made & Eka, 2016), (Parwanto & Harto, 2017) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari data yang didapatkan dan hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian, maka bisa didapatkan kesimpulan yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar jumlah aset yang ada dapat membuat sulit pemerintah daerah untuk mengawasi semua aset yang dimiliki oleh daerahnya secara langsung dan dapat menimbulkan penyalahgunaan pada aset tersebut, sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kemakmuran suatu daerah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan jika peran PAD dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah belum bisa berfungsi dengan semestinya. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota belum bisa berfungsi dengan baik dan semestinya.

Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit memerlukan revisi namun pelaksanaan revisi hanya sebagai pemenuhan kewajiban namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk memberikan kinerja yang lebih baik.

Opini audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena opini audit BPK merupakan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang menekankan pada hasil wajar dalam penyajian keuangan dan tidak berfokus pada kinerja keuangan

### **Keterbatasan**

Pada penelitian ini, variabel bebas (ukuran pemerintah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, temuan audit, dan opini audit) hanya bisa menjelaskan variable terikat (Kinerja Pemerintah Daerah) 31,0%, artinya 69% kinerja keuangan daerah tidak terdapat pada penelitian ini.

Instrumen dalam mengukur variable penelitian saat ini menggunakan instrument yang diambil dari penelitian yang sebelumnya, jadi bisa saja terdapat kelemahan dalam melakukan terjemahan instrument yang bisa saja menyebabkan terjadinya perubahan arti atau kemungkinan penelitian salah dalam mempresepsikan maksud yang sebenarnya.

### **Saran**

Dari hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran yang diberikan bagi pemerintah daerah tingkat II sebaiknya memaksimalkan belanja modal dan *instrumental revenue* karena terbukti dapat meningkatkan kinerja, namun disamping itu pemerintah daerah juga melakukan efisiensi dalam penggunaan aset agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Temuan audit BPK sebaiknya disikapi secara positif sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah pada masyarakat sehingga pemerintah daerah akan melakukan tindak lanjut yang optimal atas temuan-temuan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagi akademis dilihat dari hasil *adjusted R square* sebesar 31,0% yang berarti masih terdapat variable independen lain diluar penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variable kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka untuk penelitian yang akan datang diharapkan bisa menambahkan variable independen lainnya yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tersebut diantaranya adalah ukuran legislative. Ukuran legislative diprediksi bisa memberikan pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah sebab makin besar jumlah legislative diharapkan dapat melakukan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Noviyanti, N., Jurusan Akuntansi, K., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2016). Accounting Analysis Journal PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. In AAJ (Vol. 5, Issue 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Andirfa, M., Basri, H., Shabri, M., & Majid, A. (2016). PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018a). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018b). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Asmaul, A. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur ). <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen / Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo (1st ed.). BPFE.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (n.d.). Pengertian Kemakmuran. In Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online.
- Kusumawardani, M., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2012). Accounting Analysis Journal LEVERAGE TERHA-DAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. AAJ, 1(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Maiyora, G., Yusraini, P. :, & Natariasari, R. (2015). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DARAH KABUPATEN/KOTA (STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA). Jom FEKON, 2(2).
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUANDAN OPINI AUDIT BPKPADAKINERJA KEUANGAN.
- Minarsih, R. A. (2015). PENGARUH SIZE, WEALTH, LEVERAGE DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH.

- Ni Made, S., & Eka, A. S. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 15.2.
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 6(1), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- PD Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D (Vol. 225). CV. Alfabeta.
- Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017, (2017).
- Peraturan Daerah Pemerintah Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017, (2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018, (2018).
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PAD, LEVERAGE, DANA PERIMBANGAN DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). 3.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Akuntansi & Auditing, 8.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 1.
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (2004).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2004).
- Wahyudin, A., & Dhini Suryandari. (2013). PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), UKURAN(SIZE), DAN KEMAKMURAN(WEALTH)PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.